

MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
(STUDI DI MADRASAH ALIYAH MU'ALLIMIN MU'ALLIMAT
MUHAMMADIYAH GARUT)

Luqman Al-Hakim Musthafa
Dosen STAIDA Muhammadiyah Garut
Mahasiswa S3 PAI UMJ

Abstract

This study proves that education funding that utilizes various existing financial sources. This study agrees with Umi Zulfa (Effective Madrasah Development Strategy through the Development of a Management Model for Madrasah Education Financing Based on Ziswa-School Retribution (Study in MI Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap, 2016) namely the management of education funding through the Ziswa model as a rich, abundant education fund and sustainable madrasahs that can be used to improve the quality of education This research uses qualitative descriptive methods.

Keywords: *Financing, financing model, Ta'awun Fund*

A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan adalah usaha mewujudkan suatu visi negara atau bangsa mengenai masa depannya, dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Proses pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu, yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat lokal sampai kepada masyarakat global. Fungsi pendidikan, bukan hanya menggali potensi yang ada dalam diri

manusia, tetapi juga manusia dapat mengontrol potensi-potensi yang telah dikembangkannya agar dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Pendidikan sampai saat ini diyakini sebagai media utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan ini akan mempunyai nilai... jika memiliki sikap, perilaku, wawasan kemampuan, keahlian, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Nilai-nilai SDM tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan persekolahan baik pada jenjang dasar menengah, maupun pendidikan tinggi (Suryadi, 1990: 58).

Nilai-nilai (*values*) yang diraih melalui upaya bidang pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pencapaian prestasi akademis yang berhubungan dengan aspek pengetahuan saja, tetapi juga erat kaitannya dengan target pencapaian perubahan sikap dan keterampilan, baik yang berhubungan dengan keilmuan tersebut ataupun keterampilan yang berhubungan dengan tuntutan hidupnya. Oleh karena itu, sistem yang dibangun di dalamnya serta pengelolaannya harus dilandasi konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada pada teori-teori manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan merupakan totalitas atau keterpaduan dari sejumlah fungsi secara sistemik, setiap fungsi memiliki spesifikasi dalam efektivitasnya untuk mencapai tujuan keberhasilan organisasi. Ketercapaian tujuan pendidikan yang diharapkan tidak terlepas dari

optimalisasi keterpaduan antara fungsi-fungsi utama dalam perilaku organisasi di bidang pendidikan, yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada dasarnya perencanaan dan pelaksanaan merupakan kesatuan tindakan. Pengawasan dan pengendalian yang diperlukan untuk memberikan dorongan, bimbingan, penilaian dan kesempatan untuk menumbuhkan-potensi dan keahlian sumber daya manusianya, sekaligus mencegah terjadinya sejumlah penyimpangan dan penyelewengan, pada akhirnya pengawasan dapat berfungsi untuk melihat bagaimana hasil yang dicapai.

Mutu pendidikan yang selalu mendapat perhatian semua pihak termasuk tenaga pendidikan di setiap lembaga penyelenggara dan pengelola pendidikan. Karena mutu hasil pendidikan merupakan suatu evaluasi terhadap proses pendidikan dengan harapan tinggi untuk dicapai dan meningkatkan kemampuan serta prestasi para pelanggan pendidikan. Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses

pendidikan (Hoy, 2000: 47). Merujuk pada konsep dan esensi manajemen pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan harus menjadi program utama di sekolah atau madrasah.

Dalam hal ini pemerintah sangat berkepentingan untuk menentukan sebuah kebijakan yang implementasinya menerapkan suatu bentuk manajemen yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan yaitu manajemen peningkatan mutu terpadu dalam pendidikan. Dalam aplikasinya istilah mutu terpadu dalam pendidikan disebut *Total Quality in Education*. Dalam konteks penerapan konsep manajemen mutu total terhadap pendidikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Edward Sallis: "*Total Quality Managemen is a philosophy improvement which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceding present and future customers need, want, and expectations*" (Sallis, 2007: 14).

Teori tersebut memberikan sebuah arahan bahwa manajemen mutu total menekankan kepada

sejumlah konsep, di antaranya terdapat dua konsep utama yaitu: *pertama*, sebagai suatu filosofi perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan (*continuous improvement*), dan *kedua* berkaitan dengan pemanfaatan alat-alat dan teknik untuk perbaikan mutu dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, maka manajemen mutu terpadu berfokus kepada kepentingan peserta didik atau untuk kepentingan program perbaikan sekolah yang dilakukan secara kreatif dan konstruktif. Pemaknaan mutu total dalam pendidikan merupakan aplikasi konsep manajemen mutu, yang diselaraskan dengan karakter dasar sekolah atau madrasah sebagai suatu organisasi jasa yang mempunyai tugas utama (*core business*) membangun dan menumbuhkan serta sekaligus memberi jaminan terhadap berlangsungnya proses pembelajaran yang bermutu (*qualified learning process*), yang pada gilirannya mampu melahirkan lulusan yang sesuai dengan harapan

semua pihak atau pemangku kepentingan (*stake holders*) pendidikan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah kepemimpinan yang tidak efektif. Kepala sekolah kurang memahami sekolah sebagai suatu sistem *organik*. Sebagai *leader*, kepala sekolah lebih banyak memaksakan kehendak, lebih bersandar pada kekuasaan atau surat keputusan, suka menciptakan rasa takut, suka menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu, mengembangkan suasana yang menjemukan, dan suka melimpahkan kesalahan kepada orang lain (Yunus, 2007).

Tantangan selanjutnya, bahwa sekolah atau madrasah cenderung dikelola dengan manajemen seadanya bahkan dikelola dengan kekurangan sumber daya, satu contoh penyusunan atau perancangan pembiayaan pendidikan yang kurang diperhatikan. Apabila hal itu memang terjadi, berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan

organisasi harus segera dicari. Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan sistem dan model pembiayaan pendidikan pada sekolah/madrasah.

Pembiayaan pendidikan dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia merupakan komponen strategik yang akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bermutu tidaknya praktek pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komponen pembiayaan pendidikan (Zulfa, 2016). Sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kemudian dalam BAB III Pasal 5 ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Penjaminan mutu pembiayaan pada sekolah/madrasah termasuk ke dalam salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam Pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Sedangkan tujuan SNP selanjutnya disebutkan dalam pasal 4: SNP bertujuan *menjamin mutu* pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Idealnya persoalan pembiayaan pendidikan yang

berujung kepada tidak efektif, tidak efisien dan tidak bermutunya pendidikan di Indonesia semestinya tidak akan muncul, setidaknya bisa diminimalisir. Tetapi pada kenyataannya, persoalan tersebut masih banyak muncul. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengamatan atas kondisi real di Indonesia dari berbagai sumber, seperti: masih banyak anak usia sekolah tidak sekolah walaupun sudah ada kebijakan BOS, BSM dan sebagainya. Masih banyak sekolah/madrasah yang tidak bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia masih mengalami beberapa kendala masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembinaan SMP di seluruh Indonesia terkait dengan akses pendidikan di tingkat SMP yang masih relatif rendah. Secara nasional tercatat pada tahun 2006-2008 angka partisipasi murni (APM) baru mencapai 63,67%, angka partisipasi kasar (APK) baru mencapai 85,22%, dan angka partisipasi sekolah (APK)

baru mencapai 85,65%. Selain akses, masalah mutu pendidikan SMP mencakup tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, manajemen, proses, dan prestasi siswa masih rendah (Chairunnisa, 2016).

Keefektifan organisasi pada dasarnya merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mewujudkan tujuannya. Keberhasilan organisasi ditunjukkan dengan upaya organisasi secara efektif dalam mewujudkan tujuannya. Keefektifan menjelaskan tentang suatu aktivitas yang dilakukan secara efektif. Istilah efektif biasanya digunakan bersama-sama dengan istilah efisien. Buhler (2001) menyatakan bahwa efektif berarti melakukan pekerjaan dengan benar, sedangkan efisien berarti melakukan pekerjaan yang benar.

B. Kajian Teoretis Pembiayaan Pendidikan

1. Definisi Pembiayaan Pendidikan

Secara leksikal pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk

mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb.) sesuatu; ongkos; belanja. Maka, pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (Sugono, 2008: 195). Biaya (*cost*) merupakan salah satu komponen masukan (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Supriadi, 2006: 3). Secara bahasa biaya (*cost*) dapat diartikan sebagai pengeluaran, atau dalam istilah ekonomi berarti biaya/pengeluaran yang berupa uang atau bentuk moneter lainnya (Hallak, 2000: 1). Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Mulyasa, 2003: 47). Dalam hal ini, biaya dapat diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan (Harsono, 2007: 9). Pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan teori ekonomi pendidikan. Samuelson (1961) mengemukakan bahwa ekonomi pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan mengenai

bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak, di kalangan masyarakat (Ferdi, 2013).

Panduan Fasilitasi Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Penyusunan Kebijakan menyebutkan bahwa biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (*input*) baik dalam bentuk *natura* (barang), pengorbanan peluang maupun uang yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan (DBE1 Management and Governance, 2008: 9).

Konsep biaya dalam bidang pendidikan memberikan pandangan bahwa lembaga pendidikan merupakan produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai nilai

yang dimiliki seorang lulusan. Lembaga pendidikan memperoleh *input* berupa sumber daya manusia yang kemudian diproses melalui kegiatan pendidikan dan keterampilan untuk menghasilkan *output* yang mampu bersaing serta dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja (Ferdi, 2013).

Abbas Ghozali (2012) mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, oleh karenanya untuk menghitung biaya pendidikan harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan termasuk kualifikasi atau spesifikasi dan jumlahnya, untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Pembiayaan Pendidikan mengacu pada pengetahuan atau pemahaman tentang pentingnya uang dan penggunaannya. Secara harfiah pembiayaan pendidikan sebagai penggunaan uang yang bijak. Melek finansial adalah kemampuan untuk memahami keuangan. Lebih khusus

lagi, ini mengacu pada seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan yang tepat dan efektif melalui pemahaman tentang keuangan. Definisi paling umum tentang melek finansial adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan pribadi mereka (Norman, 2010: 200).

2. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan pada tataran makro (nasional) maupun mikro (sekolah), dikenal beberapa jenis biaya pendidikan yakni biaya langsung (*direct cost*) dan tak langsung (*indirect cost*), biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*), biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan biaya bukan dalam bentuk uang (*non-monetary cost*).

Pertama, biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan

(Supriyadi, 2006: 4). Nanang Fattah (2004: 23) menambahkan bahwa biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*) (Supriyadi, 2006). Atau dengan kata lain, biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Fattah, 2004).

Kedua, biaya pribadi (*private cost*) dan biaya sosial (*social cost*). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau

dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tidak sama, karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Perbedaan antar-provinsi/kabupaten
- b. Pengeluaran keluarga berdasarkan status sosial
- c. Pengeluaran keluarga berdasarkan lokasi sekolah
- d. Pengeluaran keluarga berdasarkan tingkat penghasilan
- e. Pengeluaran keluarga berdasarkan penampilan fisik sekolah
- f. Pengeluaran siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua (Anwar, 2003: 18).

Selanjutnya, biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang

dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. *Ketiga*, biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*non-monetary cost*).

Biaya pendidikan menurut sumbernya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/ wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri (Harsono, 2007: 10). Mulyasa menyatakan bahwa pemikiran tentang dana pendidikan paling tidak dapat difokuskan pada dana langsung, dana tidak langsung, sumber-sumber dana pendidikan, kriteria kesejahteraan sosial maksimum, kriteria keputusan, dan beberapa masalah dalam analisis keuntungan biaya. Biaya tak langsung sering juga dipandang sebagai biaya pendidikan yang tidak dapat dilihat secara nyata (*hidden costs*) yang dapat dibedakan menjadi;

- a. biaya yang seolah-olah hilang karena siswa bersekolah, dibandingkan dengan seandai-

- nya bekerja untuk mendapatkan pemasukan (uang),
- b. nilai pengecualian pajak seperti yang umumnya dikenakan pada lembaga-lembaga non-profit (tidak terkecuali lembaga pendidikan),
 - c. *inputed costs* depresi dan bunga (dalam hubungannya dengan biaya-biaya gedung dan perlengkapan pendidikan sekolah) (Mulyasa, 2003: 168).

Pembiayaan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 62 terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Pertama, biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. *Kedua*, biaya personal pendidikan meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar secara teratur dan berkelanjutan. Biaya personal peserta didik antara

lain pakaian, transport, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya. *Ketiga*, biaya operasi pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan sedangkan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pada Pasal 3 disebutkan :

(1) Biaya pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik.

(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. biaya investasi, yang terdiri atas:

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - a) bantuan biaya pendidikan; dan
 - b) beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya personalia; dan
 - 2) biaya nonpersonalia.
3. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Di negara lain, model-model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Menurut John S. Mrophet (1975: 235), pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

a. Flat Grant Model

Flat grant model menggunakan sistem distribusi dana. Semua kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah dan daerah yang sumber daya alamnya tidak melimpah, untuk membiayai program pendidikan tetap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direflesikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.

b. Equalization Model

Equalization model ini bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima

bantuan dana lebih utama dibanding dengan masyarakat yang *income*-nya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 per mil dana dasar daerah.

Menurut Thomas H. Jones (1985: 100-131), ada enam model pembiayaan pendidikan, yaitu:

a. Flat Grant

Flat grant merupakan tipe perencanaan bantuan pembiayaan pendidikan yang pertama dan tertua. Dalam rencana ini, setiap sekolah memiliki sejumlah dana yang sama, yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu, akibat dari sistem bagi rata, maka sekolah yang jumlah siswanya banyak akan mengeruk uang lebih besar, sehingga atas dasar hal tersebut *flat grant* tidak dianggap sebagai *equalizing*.

Flat grant bisa cocok di bawah kondisi-kondisi politik yang memiliki konsensus yang memutuskan bahwa semua distrik atau semua sekolah mendapat bantuan yang sama terlepas dari seberapa besar kekayaan mereka atau seberapa rendah tarif pajak yang mereka berlakukan.

b. Power Equalizing

Power equalizing dibebankan kepada daerah-daerah yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari daerah-daerah kaya untuk manambah bantuan bagi daerah-daerah yang miskin.

Setiap daerah akan menerima jumlah dana berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah (APBD). Daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 per mil dana dasar daerah. Dengan demikian akan ada keseimbangan dana antar daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya.

c. *Complete State Model*

Complete state model adalah satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam pemerolehan pajak tidak akan ada pajak *property* sekolah lokal dengan berbagai taraf dan basis pajak lokal adalah *unequal* (tidak seimbang). Para pendukung juga mengatakan bahwa pengawasan keuangan lokal tidak efisien untuk masyarakat secara keseluruhan. Maka *complete state model* menempatkan lebih banyak tanggung jawab untuk akuntabilitas pendidikan secara merata di tingkat negara bagian.

d. *Foundation Plan*

Foundation plan, dirancang untuk menggali empat masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu: kesetaraan pembelanjaan, penetapan-penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, pemisahan (*demarkasi*) wewenang politik antara daerah-daerah sekolah lokal dengan negara bagian, dan provisi untuk perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan. Para

pendukungnya menganggap bahwa negara harus mematok batas-batas minimum dan pemerintah lokal harus diperbolehkan untuk melampaui batas-batas minimum hingga ke tingkatan yang memang ingin mereka lakukan.

Cara kerja *foundation plan* adalah, *pertama*, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. *Kedua*, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. *Ketiga*, negara memberikan hibah (*grants*) kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Sedangkan besarnya bantuan adalah situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak. *Foundation plan* membagi kue dengan porsi yang sama, namun distrik-distrik miskin lebih diutamakan.

e. *Guaranteed Percent Equalizing Model*

Guaranteed percent equalizing model ini dimaksudkan bahwa negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang

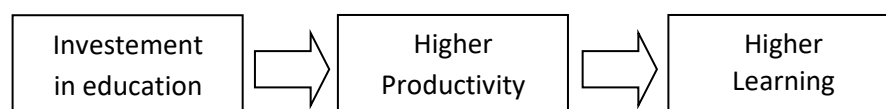
diinginkan oleh tiap distrik sekolah lokal. Penyertaan persentase negara diberlakukan tinggi pada daerah-daerah sekolah melarat, dan persentase sekolah rendah pada daerah yang kaya. Para pendukung model ini menyatakan bahwa memaksimalkan pengawasan lokal, kesetaraan wajib pajak, dan efisiensi sekolah lokal. Model ini juga mendukung kesetaraan pembayar pajak. Model ini memastikan atau menjamin tiap distrik sekolah lokal dengan sejumlah dana tertentu persiswa untuk tiap per mil pajak yang dipungut secara lokal.

f. Complete Local Support Model

Dalam *complete local support model*, semua sumber dana dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah. Sistem ini akan memberikan dampak pada sistem pendidikan yang ada di daerah, karena bisa saja pendapatan daerahnya yang tinggi memberi jumlah dana yang tinggi pula, yang pada akhirnya berbuah pada kualitas hasil (*output*) yang berbeda.

Model pembiayaan tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat kekurangan dan keunggulannya masing-masing. Di Indonesia pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, dan masyarakat. Penerapan model pembiayaan tersebut di atas akan menjadi sebuah model yang ideal sesuai dengan latar geografis dan sosial budaya lokal.

Selain yang disebutkan di atas, terdapat pula model pembiayaan pendidikan *human capital*. Pada hakikatnya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan: 1) proses pelaksanaan pendidikan; 2) distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan; dan 3) biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan, dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan. Dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya melalui pendekatan *human capital* telah dikembangkan oleh Cohn (1979) dalam suatu model sebagai berikut.



Gambar 1.1
Alur pendekatan *human capital*

Pendekatan *human capital* yang dikembangkan dalam bentuk model tersebut, aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu maupun kelompok. Pada gilirannya taraf produktivitas ini mempengaruhi taraf perolehan (*earning*) seseorang atau kelompok, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

C. Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut

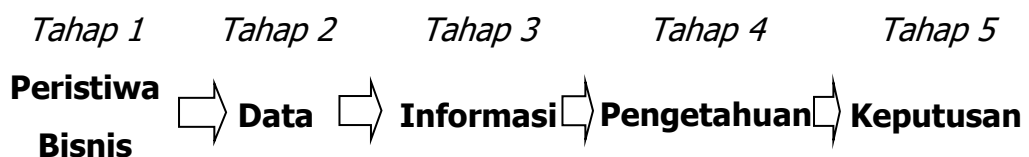
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hsu-Tong Deng, Li-Chiu Chi, Nai-Yung Teng, Tseng-Chung Tang, and Chun-Lin Chen dengan judul *Influence of Financial Literacy of Teachers on Financial Education Teaching in Elementary Schools* di Sekolah

Dasar Taiwan bahwa guru SD menunjukkan ketersediaan pembiayaan pada level menengah-tinggi dengan nilai tertinggi dalam investasi, asuransi, dan simpanan. Secara umum guru mempercayai bahwa SD saat ini tidak bisa menumbuhkan pengetahuan manajemen keuangan yang memadai pada siswa SD, dan menunjukkan ketidaksesuaian pembiayaan pendidikan untuk guru sekolah dasar. Simpulannya bahwa guru sekolah dasar tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam perolehan derajat tertinggi *highest degree earned*, jurusan perguruan tinggi, *college major*, jumlah tahun studi mengajar sosial *number of years teaching social studies*, atau lokasi sekolah *school location* dalam hal ketersediaan pembiayaan sebagai pembiayaan pendidikan (Hsu-Tong, Li-Chiu, Nai-Yung, dkk, 2013).

Penelitian Umi Zulfa (2016) dengan judul "Strategi Pengembangan Madrasah Efektif melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Ziswa-*School Levy* (Studi Di MI Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap), bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MI Ya BAKII Karangjengkol Kesugihan cukup akuntabel, dan belum memanfaatkan Ziswa sebagai sumber dana pendidikan yang kaya, melimpah, dan *sustainable*". Maka dikembangkan model konseptual model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis ziswa berorientasi madrasah efektif, yang memiliki tiga karakteristik: akuntabel, sumber dana melimpah,

kaya, dan *sustainable* serta fokus pada madrasah efektif.

Pembiayaan pendidikan perlu adanya sinergitas yang berkelanjutan antara akuntansi manajemen dan manajemen organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Blocher, Stout, dan Cokins bahwa akuntansi manajemen menggunakan keahlian uniknya dan bekerja dengan manajemen organisasi untuk membantu kesuksesan organisasi dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strateginya. Informasi manajemen biaya dikembangkan dan digunakan dalam rantai informasi organisasi, sebagaimana gambar di bawah ini (Blocher, Stout, & Cokins, 2011: 5-6).



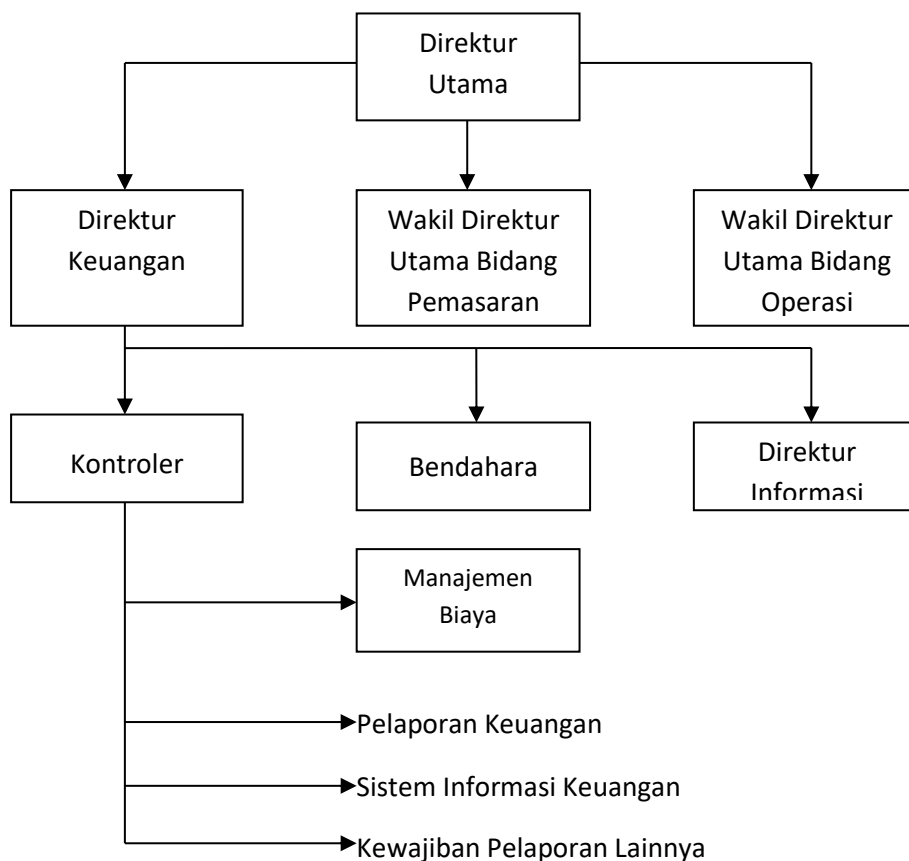
Pada tahap terendah, akuntan manajemen mengumpulkan dan meringkas data dari peristiwa bisnis dan kemudian mentransformasikan data ke informasi melalui analisis

dan penggunaan dari keahlian akuntan manajemen. Selanjutnya informasi dikombinasikan dengan informasi lain tentang strategi organisasi dan lingkungan kompetisi

untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dilakukan. Kemudian akuntan manajemen menggunakan pengetahuan tersebut untuk terlibat dengan tim manajemen untuk mengambil keputusan strategis yang memajukan strategi operasional.

Dalam organisasi tertentu, akuntan manajemen melapor kepada kontroler (*controller*), profesi akuntansi utama dalam perusahaan. Kontroler dibantu oleh akuntan manajemen, memiliki tanggung jawab yang luas

mencakup manajemen biaya, pelaporan keuangan, pemeliharaan sistem informasi keuangan dan fungsi-fungsi pelaporan lainnya. Direktur keuangan (*Chief Financial Officer-CFO*) bertanggungjawab atas keseluruhan fungsi keuangan, bendahara mengelola hubungan antara investor dengan kreditur, dan direktur informasi (*Chief Information Officer-CIO*) mengelola penggunaan teknologi Informasi perusahaan termasuk sistem komputer dan informasi.



Gambar 1.2
Bagan organisasi khas yang memperlihatkan fungsi dari kontroler

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut mengenai pembiayaan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut ini.

1. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut

Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut berdiri tahun 1998 berada di lingkungan Pesantren Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut dan penyelenggaraannya di bawah Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut. MA Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut memiliki visi: terwujudnya MA Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut sebagai lembaga pendidikan terdepan dalam menyiapkan siswa/siswi yang berpola pikir cerdas, terampil, iman taqwa, serta berakhlak mulia.

2. Model Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Mu'allimin

Mu'allimat Muhammadiyah Garut
Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut berpedoman pada:

- a. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 140/KEP/I.0/C/2016 tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal, Iuran Anggota, Infaq Siswa, Mahasiswa dan Infaq Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah diktum kedua;
- b. Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 09/KTN/I.4/F/2013 tentang Dana Ta'awun di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
- c. Keputusan bersama Majelis Dikdasmen penyelenggara, Pondok Pesantren Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut, dan kepala madrasah. Pembiayaan pendidikan MA Mu'allimin Mu'allimat Muham-

madiyah Garut bersumber dari dana ta'awun, dana pemerintah (BOS Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah/Provinsi), bantuan pendidikan program KIP, dan bantuan Yayasan Hanifah Mukhtar.

Dana ta'awun sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Ketentuan Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 09/KTN /I.4/F/2013 tentang Dana Ta'awun di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah bahwa:

Pasal 1

- (1) Dana Ta'awun adalah akumulasi dari infaq siswa, guru, karyawan, pimpinan, orang tua siswa dan masyarakat;
- (2) Infaq siswa adalah uang yang diperoleh dari siswa dalam lingkungan lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
- (3) Infaq guru adalah uang yang diperoleh dari guru dalam lingkungan lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
- (4) Infaq karyawan adalah uang yang diperoleh dari karyawan dalam lingkungan lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
- (5) Infaq pimpinan adalah uang yang diperoleh dari kepala/mudir, wakil kepala/wakil mudir;
- (6) Infaq Orang tua siswa dan masyarakat adalah uang yang diperoleh dari orang tua siswa dan masyarakat yang digunakan untuk Dana Pembangunan dan Pengembangan (DPP) pendidikan di lingkungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
- (7) Pengelolaan Dana Ta'awun adalah kegiatan pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian dan pertanggungjawaban infaq yang dilakukan oleh sekolah atau Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah Muhammadiyah disemua tingkatan.

Pasal 7

(1) Pendistribusian infaq siswa, guru, karyawan dan, pimpinan (kepala/mudir, wakil kepala/wakil mudir) dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan prosentase sebagai berikut;

- a. Dana Dakwah dan Pengembangan AUM: 10%;
- b. Dana Abadi Persyarikatan: 10%;
- c. Majelis (PPM, PWM, PDM, PCM termasuk PRM Penyelenggara): 80%.

(2) Pendistribusian uang infaq sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c di atas dilakukan oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dengan prosentase sebagai berikut:

- a. Majelis Dikdasmen PPM: 15%;
- b. Majelis Dikdasmen PWM: 20%;

c. Majelis Dikdasmen PDM: 25%;

d. Majelis Dikdasmen PCM termasuk PRM Penyelenggara: 40%.

(3) Pendistribusian infaq orang tua siswa dan masyarakat (DPP) dilakukan oleh satuan pendidikan dengan prosentase sebagai berikut:

- a. Pengembangan sekolah yang bersangkutan: 70%
- b. Pengembangan dan operasional Majelis Penyelenggara: 15%
- c. Pengembangan sekolah di lingkungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Wilayah Muhammadiyah: 15%.

Pasal 8

Pemanfaatan Dana Taawun
Dana ta'awun dimanfaatkan untuk:

- a. Peningkatan mutu akademik;
- b. Pengembangan SDM;
- c. Beasiswa guru dan siswa;

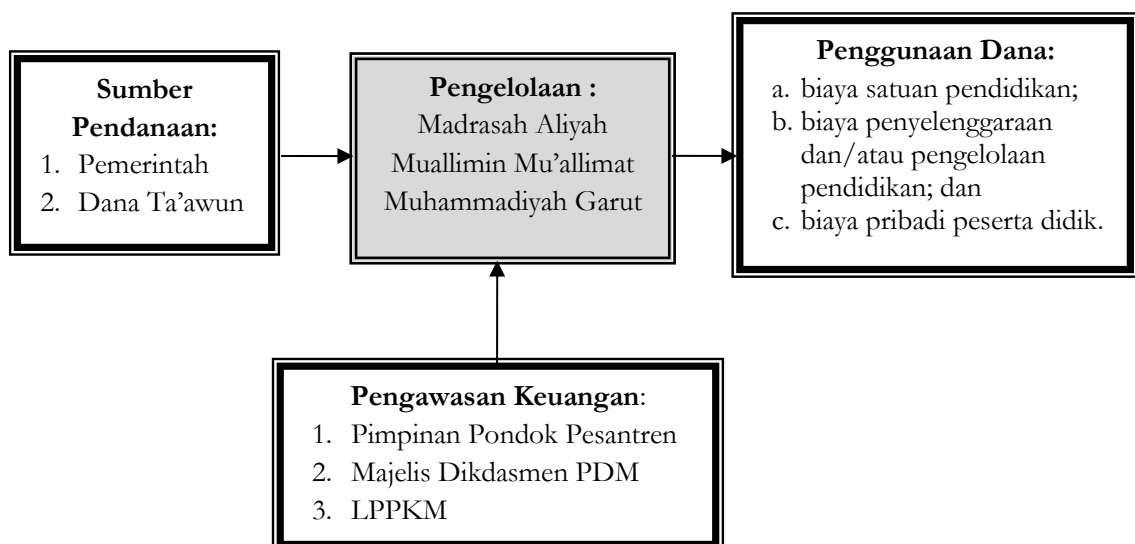
- d. Penghargaan;
- e. Operasional Majelis;
- f. Pengembangan Sarana Prasarana.

Pasal 9

Pertanggungjawaban

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dana ta'awun dilakukan oleh Majelis secara berjenjang;
- (2) Satuan pendidikan wajib melaporkan pengelolaan dana ta'awun kepada Majelis secara berjenjang pada setiap akhir tahun pelajaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas MA Mu'llimin Mu'allimat Muhammadiyah memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari *steakholders*. Akan tetapi, hal yang menarik MA Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut menerapkan model pembiayaan dana ta'awun. Alur model pembiayaan pendidikan MA Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut dapat dilihat pada bagain berikut:



Gambar 1.3
Alur model pembiayaan pendidikan Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut

Berdasarkan uraian tersebut di atas pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut diperoleh temuan sebagai berikut ini:

Model pembiayaan yang digunakan cenderung meng-gunakan model *Flat Grant* dan *Guaranteed Percented equalizing Model*. *Flat grant* karena sekolah memiliki sejumlah dana yang sama, yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Sebagaimana penjelasan terda-hulu, akibat dari sistem bagi rata, maka sekolah yang jumlah siswanya banyak akan mengeruk uang lebih besar, sehingga atas dasar hal tersebut *flat grant* tidak dianggap sebagai *equalizing*. Sedangkan *Guaranteed percent equalizing model* ini dimaksudkan bahwa pemasukan dari dana ta'awun didistribusikan berdasarkan persentase berdasarkan ketentuan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah.

a. Pada tahapan kontroler belum menggunakan sepenuhnya pengawasan keuangan yang memadai sehingga belum tertibnya manajemen keuangan

dan pelaporan keuangan serta upaya tindak lanjutnya.

- b. Belum memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi sebagai akuntan atau berlatar belakang keuangan
- c. Pembiayaan pendidikan dengan menerapkan Model pemberdayaan dana Ta'awun meskipun masih terdapat kekurangan dalam tataran teknis.
- d. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah terutama menghadapi masa Indonesia emas 2045, perlu adanya amal usaha di bidang perekonomian yang dapat menambah pendanaan pendidikan madrasah.

D. Desain Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut Grand Indonesia Emas 2045

Berdasarkan analisis pembahasan model pembiayaan di Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut,

maka desain model pembiayaan pendidikan untuk madrasah tersebut dalam rangka menyongsong Grand Indonesia Emas 2045 adalah model pembiayaan yang berdasarkan pada Wakaf, Zakat, Infaq, dan Sadaqah sebagai basis kesejahteraan bagi mutu pendidikan berkelanjutan. Model ini didasarkan pada teori dan empirik berikut ini:

Landasan pertama, berangkat dari teori bahwa pendidikan bermutu akan bisa diberikan kepada peserta didik jika madrasah mampu memenuhi dan mengembangkan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan. Standar mutu pendidikan yang dimaksud adalah 8 standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah (Permendiknas).

Landasan kedua, salah satu standar nasional pendidikan adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan akan bisa berpengaruh terhadap kebermutuan layanan pendidikan jika dimenej dengan baik dan akuntabel. Manajemen pembiayaan pendidikan

yang baik dan akuntabel adalah manajemen pembiayaan yang melaksanakan seluruh fungsinya secara akuntabel sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Landasan ketiga, Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik semestinya memiliki sumber dana yang kaya, melimpah dan *sustainable*. Idealnya sumber dana (*Financing Sources*) pembiayaan pendidikan bisa diperoleh melalui pajak (*tax*), APBN, APBD, Grants, kontributor dan *loan* (pinjaman), atau jika merujuk pada PP No. 48 Tahun 2008, maka sumber pendanaan pendidikan bisa berasal dari anggaran Pemerintah Pusat (APBN), anggaran pemerintah daerah (APBD), dan dari masyarakat (baik dari orang tua/wali siswa maupun dari pihak lain dalam bentuk sumbangan/hibah maupun biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat). Mengingat madrasah adalah lembaga pendidikan berbasis umat Islam, maka pengadaan sumber dana bisa memanfaatkan potensi ekonomi umat berupa

wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan hasil penyewaan aset/Amal Usaha Madrasah.

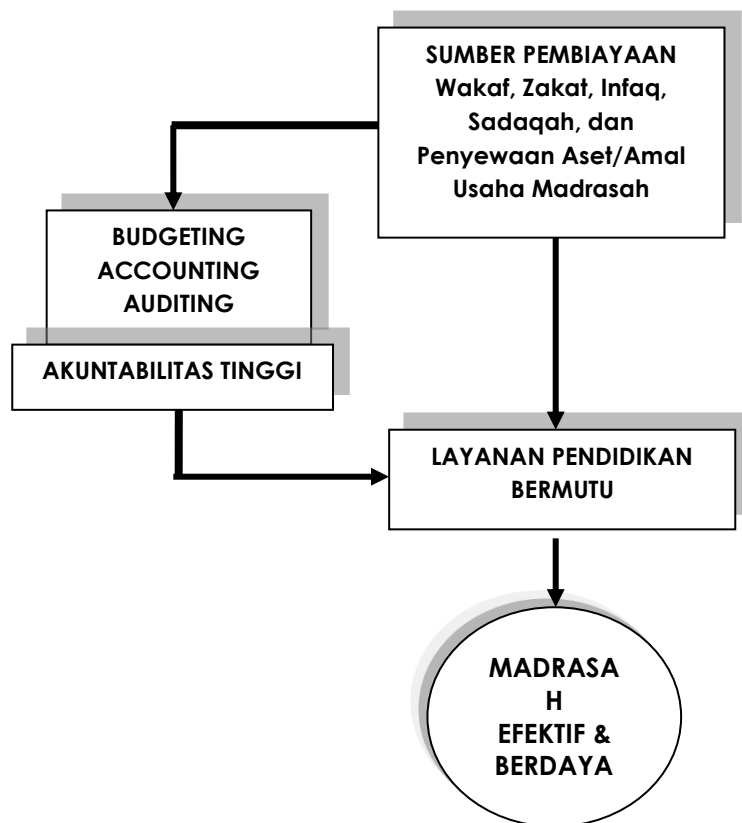
Landasan keempat, keefektifan madrasah banyak ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu yang mengacu kepada 8 standar sekaligus di-*back up* oleh sumber dana dan praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang akuntabel dan bermutu. Sehingga berkontribusi bagi naiknya minat belajar (kehadiran siswa lengkap), antusiasme belajar tinggi, guru konsisten melaksanakan tugasnya termasuk selalu memberi sekaligus menilai pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa sebagai latihan maupun pengayaan, mempertinggi ragam dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan selalu mendapatkan dukungan masyarakat dan orang tua.

Landasan kelima, landasan empirik dari temuan penelitian tentang praktek manajemen pembiayaan pendidikan di MA

Mu'allimin Mua'llimat Muhammadiyah Garut yang hanya cukup akuntabel serta sumber dana pendidikan terbatas menyebabkan layanan pendidikan kurang bermutu dan berdaya saing, sehingga mengakibatkan madrasah kurang efektif.

Sebagai model konseptual yang ditawarkan, bahwa model manajemen pembiayaan pendidikan yang harus memiliki karakteristik:

1. Akuntabilitas seluruh fungsi manajemen pembiayaan pendidikan
2. Sekolah harus memiliki sumber dana pendidikan berbasis umat yang kaya, melimpah dan *sustainable* yaitu berbasis wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan hasil penyewaan aset/Amal Usaha Madrasah.
3. Fokus layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing berdampak pada pencapaian madrasah efektif dan tingkat elastisitas yang baik



Gambar 1. 4.
Model Pembiayaan Madrasah Efektif

E. Penutup

Pemanfaatan model pembiayaan pendidikan berbasis dana ta'awun dapat meningkatkan keterbacaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Alaiyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut. Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Alaiyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut, belum memanfaatkan dana ta'awun sebagai sumber dana

pendidikan yang kaya, melimpah, dan *sustainable* secara optimal.

Model pembiayaan Madrasah Aliyah Muallimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut menggunakan dua model *flat grant* dan *guaranteed percent equalizing model* dengan mengutamakan aspek Dana Ta'awun sebagai alternatif penggabungan model pembiayaan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. Idochi. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Blocher, Stout, dan Cokins. 2011. *Cost Management A Strategic Emphasis, Manajemen Biaya Penekanan Strategis*, terjemahan David Wijaya. Jakarta: Salemba Empat.
- Buhler, P.M. 2001. *Alpha Teach Yourself: Management Skills in 24 Hours*, Indianapolis, Book End, LLC.
- Chairunnisa, Connie. "Kepemimpinan, Sistem dan Struktur Organisasi, Lingkungan Fisik, dan Keefektifan Organisasi Sekolah"; <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/3755/1183> (diakses 16 November 2016)
- DBE1 Management and Governance. 2008. *Panduan Fasilitasi Penghitungan Biaya Operasi Satuan Pendidikan (BOSP) dan penyusunan kebijakan*. Jakarta.
- Dendy Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Edward Sallis, Edward. 2007. *Total Quality Mangement in Education Terjemahan Achmad Ali et. al.*, Jogja-karta.
- Fattah, Nanang. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ferdi W. P. 2013. "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing of Education: A Theoretical Study"; Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, vol. 19, nomor 4, http://file.upi.edu/.../PENDIDIKAN.../Pembiayaan_Pendidikan_Landasan_Teori_dan_Studi, (diakses 4 Mei 2017).
- Ghozali, Abbas. 2012. "Sistem Pendanaan Pendidikan di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta, Januari 2012.
- Hallak, J. 2000. *Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan*, terjemahan Harso. Jakarta: Bhratara Karya Aksara,.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Hoy, Charles. 2000. *Improving Quality in Education*. London: Palmer Press,.
- Hsu-Tong Deng, Li-Chiu Chi, Nai-Yung Teng, Tseng-Chung Tang, and Chun-Lin Chen. 2013). "Influence of Financial Literacy of Teachers on Financial Education Teaching in Elementary Schools; International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 3, No. 1,

- <http://www.ijeeeee.org/Papers/195-K10068.pdf>, (diakses 4 Mei 2017).
- Johns, L.R. & L.F. Morphet. 1975. *The Economics and Financing of Education: A System Approach*. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- Jones, T.H. 1985. *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company Jones.
- Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 09/KTN /I.4/F/2013 tentang Dana Ta'awun di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, <http://www.muhammadiyah.or.id>, (diakses 2 Mei 2017).
- Mulyasa, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan Implementasi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Norman, A. S. 2010. "Importance of Financial Education in Making Informed Decision on Spending"; Journal of Economics and International Finance, Vol. 2(10), <http://www.academicjournals.org/JEIF> ISSN 2006-9812 (diakses 4 Mei 2016).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. <https://malut.kemenag.go.id/files/malut/.../PeraturanPemerintah/gmau1367168295.pdf>, (diakses 4 Mei 2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP48-2008DanaDik.pdf, (diakses 4 Mei 2017).
- Supriadi, Dedi. 2008. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, Ace. 1990. *Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan, Isu, Teori dan Praktek*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yunus, F. 2007. *Manajemen Mutu Sekolah*, (<http://www.portalduniaguru.co.id>), (di akses 16 November 2016).
- Zulfa, Umami. 2016. "Strategi Pengembangan Madrasah Efektif melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis *Ziswa-School Levy* (Studi di MI Ya Bakii

Karangjengkol Kesu-gihan
Cilacap)"; Jurnal Wahana
Akademika, Volume 3 Nomor
1 <http://download.Portal>

garuda.org/article.php?...STRATEGI%20PENGEMBANGAN%20M... (diakses 4 Mei 2017).